



**H. BAMBANG PU DJIONO, SH.  
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH.  
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)  
TAHUN 2013  
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Substansi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang memuat :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
- B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi; dan
- C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Adapun maksud penyusunan Informasi LPPD ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2013,

sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya tanggapan dan saran itu disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan.

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Grobogan berada di bagian timur Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara administrasi terbagi dalam 19 Kecamatan, 273 Desa dan 7 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang

Luas wilayah Kabupaten Grobogan kurang lebih 1.975,86 Km<sup>2</sup>, menjadikan Kabupaten yang memiliki wilayah terluas ke-2 se-Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Purwodadi.

## **2. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2013 tercatat sebesar 1.402.760 jiwa, dengan angka sex ratio 101 yang artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Data jumlah penduduk ini adalah data yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2014, Nomor 470/328/SJ, perihal Pemanfaatan Data Kependudukan, yang mewajibkan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Kepadatan penduduk tercatat sebesar 710 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.663 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah berada di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 343 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dari aspek sex ratio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 705.352 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 697.408 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan usia, rasio ketergantungan penduduk sebesar 40%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 40 orang yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi, berdasarkan angka tersebut, maka di Kabupaten Grobogan dapat dikategorikan dalam ketergantungan rendah.

Jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 19,84% pada tahun 2008,

berurutan mengalami penurunan menjadi 18,68%, 17,86%, 17,38% dan pada akhir tahun 2012 sebesar 16,13%.

Gambaran pendidikan penduduk pada tahun 2013 dapat dilihat dari tingkat pendidikan, dengan komposisi tertinggi pada tamatan SD atau sederajat sebanyak 49%, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 22%, SLTP atau sederajat 17%, tamatan SMU atau sederajat 10%, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2%.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir, masuk dalam kategori kelas menengah atas dan selalu mengalami kenaikan yaitu mulai dari 70,22 pada tahun 2008 dan 71,77 pada akhir tahun 2012.

### **3. Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun angkanya fluktuatif, terakhir mencapai angka pertumbuhan 4,59%. Demikian juga halnya untuk PDRB Perkapita kondisinya terus mengalami kenaikan. PDRB Perkapita atas dasar Harga Konstan sebesar Rp.2.601.710,- atau naik 3,75% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.6.210.840,- atau naik sebesar 10,15%.

Dari aspek pemerataan pendapatan, dapat dilihat melalui indikator **Gini Ratio** dan **Proporsi Pendapatan yang Dinikmati Oleh Kelompok 40% Penduduk yang Berpendapatan Terendah**. Berdasarkan kedua indikator tersebut, pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan masih berada pada kategori ketimpangan rendah. Hal ini dilihat dari :

*Pertama*, bahwa indikator Gini Ratio akhir tahun 2012 sebesar 0,35. *Kedua*, bahwa berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah yang menikmati pendapatan total kabupaten pada tahun 2012 sebesar 18,91%, dan selalu di atas 17% selama lima tahun sebelumnya.

## II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

### A. VISI DAN MISI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun yaitu **”Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”**.

Selanjutnya Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan kongkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

## B. PRIORITAS DAERAH

Untuk lebih fokus dalam pencapaian visi misi tersebut, maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaannya.

RKPD inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD, sehingga dengan demikian terdapat keterkaitan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013, prioritas pembangunan tahun 2013 diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum daerah.
2. Prioritas pembangunan di bidang pendidikan.
3. Prioritas pembangunan di bidang kesehatan.
4. Prioritas pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan.
6. Prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
7. Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

## III. KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan secara teknis didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan prinsip

Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.

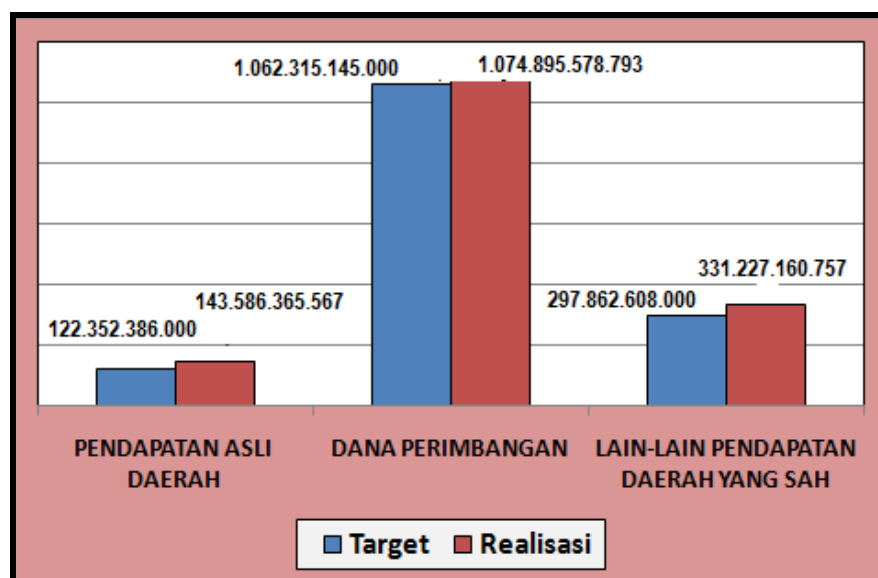
Selanjutnya, disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh BPK RI.

#### A. PENDAPATAN DAERAH

Dalam APBD Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 target Pendapatan sebesar Rp.1.482.530.139.000,- terealisasi Rp.1.549.709.105.117,- atau 104,53% dengan perincian :

1. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.122.352.386.000,- terealisasi Rp. 143.586.365.567,- atau 117,35 %;
2. Target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.062.315.145.000,- terealisasi Rp.1.074.895.578.793,- atau 101,18 %; dan
3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.297.862.608.000,- terealisasi Rp.331.227.160.757,- atau 111,2%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



**Gambar 1**  
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013

Secara rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan**  
**Tahun Anggaran 2013**

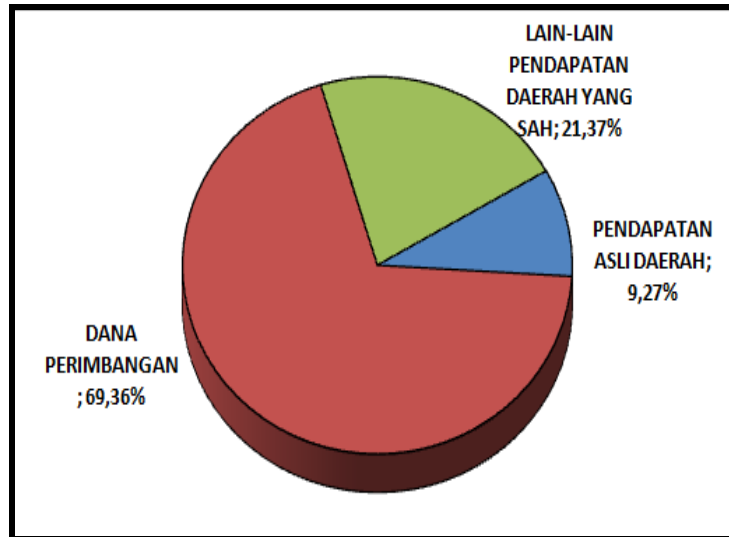
NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>PENDAPATAN</b>	1.482.530.139.000	1.549.709.105.117	104,53
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>122.352.386.000</b>	<b>143.586.365.567</b>	<b>117,35</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	34.254.320.000	42.622.520.501	124,43
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.915.897.000	13.577.239.907	113,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.453.116.000	11.471.523.229	100,16
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.729.053.000	75.915.081.930	117,28
<b>B</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.062.315.145.000</b>	<b>1.074.895.578.793</b>	<b>101,18</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.666.670.232	62.390.180.431	125,62
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.677.669.768	1.534.593.362	91,47
3	Dana Alokasi Umum	906.666.365.000	906.666.365.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	104.304.440.000	104.304.440.000	100,00
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>297.862.608.000</b>	<b>331.227.160.757</b>	<b>111,20</b>
1	Pendapatan Hibah	3.230.200.000	1.099.143.300	34,03
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.210.067.000	37.581.841.865	120,42
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	206.558.228.000	217.919.024.000	105,50
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	56.864.113.000	74.627.151.592	131,24

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.( angka sementara, belum diaudit BPK)

Komposisi Sumbangan terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan sebesar 69,36% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 21,37% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,27%.

Komposisi penyumbang Pendapatan Daerah ini, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :





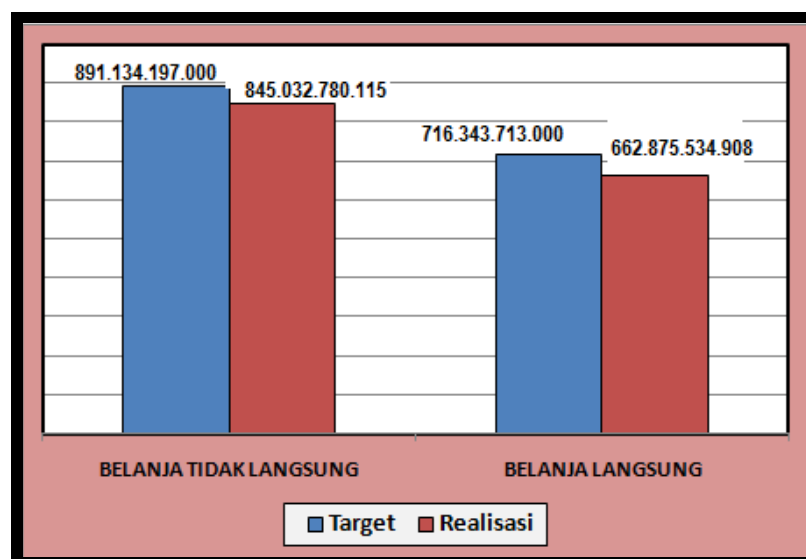
**Gambar 2**  
Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2013

## B. BELANJA DAERAH

APBD Kabupaten Grobogan tahun 2013 dengan target belanja sebesar Rp.1.607.477.910.000,- terealisasi Rp. 1.507.908.315.023,- atau 93,81% dengan perincian :

1. Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.891.134.197.000,- terealisasi Rp. 845.032.780.115,- atau 94,83%; dan
2. Target Belanja Langsung sebesar Rp.716.343.713.000,- terealisasi Rp.662.875.534.908,- atau 92,54%.

Adapun Serapan Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



**Gambar 3**  
Perbandingan Target Dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2013

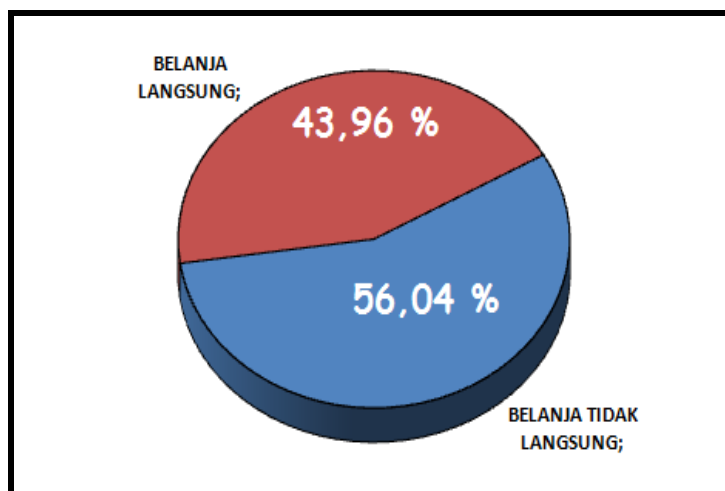
Secara rinci target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>BELANJA</b>	<b>1.607.477.910.000</b>	<b>1.507.908.315.023</b>	<b>93,81</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>891.134.197.000</b>	<b>845.032.780.115</b>	<b>94,83</b>
1	Belanja Pegawai	814.064.607.000	774.438.503.612	95,13
2	Belanja Bunga	47.179.000	35.959.948	76,22
3	Belanja Subsidi	428.500.000	428.500.000	100,00
4	Belanja Hibah	22.572.660.000	20.611.994.000	91,31
5	Belanja Bantuan Sosial	15.051.860.000	12.807.409.550	85,09
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.440.420.000	2.440.420.000	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota Pemerintahan Desa	34.651.064.000	33.911.412.590	97,87
8	Belanja Tidak Terduga	1.877.907.000	358.580.415	19,09
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>716.343.713.000</b>	<b>662.875.534.908</b>	<b>92,54</b>
1	Belanja Pegawai	44.988.292.475	42.425.671.965	94,30
2	Belanja Barang dan Jasa	290.398.313.871	267.416.546.043	92,09
3	Belanja Modal	380.957.106.654	353.033.316.900	92,67

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

Komposisi serapan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 56,04% dan belanja langsung 43,96%, dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 4**  
**Komposisi Belanja Daerah Tahun 2013**

### C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam penganggarannya Pembiayaan daerah dianggarkan dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 sebesar Rp. 141.123.082.558,- atau 98,02% dari target penerimaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 18.553.726.600,- atau 97,48% dari target pengeluaran.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2013, terdapat Surplus sebesar Rp. 41.800.790.094,- serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 122.569.355.958,- sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 164.370.146.052,-.

Realisasi pembiayaan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013**

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN	1.482.530.139.000	1.549.709.105.117	104,53
2	BELANJA	1.607.477.910.000	1.507.908.315.023	93,81
	<b>surplus/defisit</b>	<b>(124.947.771.000)</b>	<b>41.800.790.094</b>	
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	143.980.758.000	141.123.082.558	98,02
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.032.987.000	18.553.726.600	97,48
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>124.947.771.000</b>	<b>122.569.355.958</b>	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	164.370.146.052	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

#### IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib dan pilihan, dengan anggaran sebesar Rp.716.343.713.000,- dan terealisasi 92,54%. Dengan perincian untuk 26 urusan wajib sebesar Rp.676.275.148.958,- terealisasi 92,35% dan 8 urusan pilihan sebesar Rp.40.068.564.042,- terealisasi 95,59%.

Selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2013, akan saya paparkan secara singkat sebagai berikut:

##### A. PRIORITAS PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAERAH

Sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian, sarana dan prasana transportasi memegang peranan yang sangat penting. Pada tahun 2013, dari seluruh jalan Kabupaten sepanjang 890,01 km, jalan dengan kondisi baik/mantap mencapai 31,6%, kondisi sedang 10,6%, kondisi rusak ringan 25,99%, sedangkan jalan rusak berat sebesar 31,7%.

Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan tren yang lebih baik. Jalan rusak ringan memang bertambah sepanjang 10,79 km, namun ruas jalan kondisi mantap bertambah sepanjang 11,69 Km, jalan kondisi sedang bertambah 25,31 km, dan jalan rusak berat berkurang sepanjang 47,79 km.

Secara keseluruhan, usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum daerah, dilakukan melalui Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan yang tertuang dalam program kegiatan urusan baik yang bersifat umum maupun spesifik, dengan anggaran sebesar Rp.237.335.187.000,- dan terealisasi 92,6%.

Adapun prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program ini dilaksanakan melalui 526 paket peningkatan jalan sepanjang ± 142,51 km, meliputi 58 paket Kontruksi *paving block* sepanjang 12,54 km, 321 paket Beton setapak sepanjang

72 km, 55 paket Beton *Full Rigid* sepanjang 16,07 km, 28 paket ATB sepanjang 11 km dan 64 paket *Telford* sepanjang 30,9 km.

**b. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, di antaranya berupa 72 paket *Telford* sepanjang 26,47 km, 6 paket trotoar sepanjang 0,35 km dan 31 paket rehab jembatan total sepanjang 0,65 km.

**c. Program Pengendalian Banjir**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain berupa : 2 paket pemasangan bronjong sepanjang 0,06 km, 66 paket perbaikan talud sepanjang 9,5km, 3 paket perbaikan longsor sepanjang 0,3 km dan perbaikan saluran sebanyak 46 paket sepanjang 46 km.

Perlu saya sampaikan, bahwa dalam melaksanakan prioritas ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Tugas Pembantuan/Urusan Bersama, dalam bentuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dengan anggaran sebesar Rp.27.250.000.000,- terealisasi 100%.

Selain melalui anggaran belanja langsung dan Tugas Pembantuan tersebut, juga dialokasikan melalui belanja tidak langsung diantaranya berupa : Belanja Bantuan PAMSIMAS, Dana Daerah untuk program bersama PNPM Mandiri Perkotaan, Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin, dan Bantuan Sosial Pemberdayaan Pembangunan Jalan Antar Desa, dengan anggaran Rp.10.243.360.000,- terealisasi 98,92%.

**B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN**

Dalam Urusan Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib memiliki peran yang penting, mengingat begitu besar peranan pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal.

Berdasarkan indikator kinerja kunci pendidikan pada tahun 2013 menunjukkan indikasi perbaikan, di antaranya adalah capaian kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 50,02%, meningkat 11,36% dibandingkan tahun 2012. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, juga mengalami kenaikan dengan capaian kinerja sebesar 95,15%, meningkat 0,06%. Demikian halnya angka kelulusan (AL) dan angka

melanjutkan sekolah (AM) mulai tingkat SD, SLTP, dan SLTA juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Untuk memantapkan kualitas pendidikan tersebut, dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Urusan Perpustakaan yang dialokasikan dalam program kegiatan baik program yang bersifat umum maupun spesifik dengan total anggaran Rp.187.595.786.918,- atau sebesar 89,2%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan dimaksud adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Selain belanja langsung tersebut di atas, juga dialokasikan belanja tidak langsung, dengan total anggaran sebesar Rp.14.984.750.000,- dengan capaian 95,61%, yang dipergunakan antara lain untuk Bantuan Hibah kepada kelompok masyarakat bidang Pendidikan dan kelompok masyarakat bidang keolahragaan non profesional.

### **C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEHATAN.**

Masalah kesehatan merupakan masalah fundamental, yang menjadi fokus perhatian penyelenggaraan pelayanan publik. Sektor kesehatan juga merupakan suatu subsistem dari sistem pengembangan kualitas sumber daya manusia, dalam menghadapi tantangan global yang semakin beragam.

Kinerja bidang kesehatan pada tahun 2013 dalam performa yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya indikator kinerja kunci bidang kesehatan diantaranya adalah : capaian kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan meningkat 1,8% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 98%; dan Cakupan kunjungan bayi juga meningkat sebesar 0,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 97,16%.

Usaha meningkatkan pembangunan di bidang Kesehatan, diselenggarakan melalui Urusan Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang dialokasikan dalam program kegiatan baik program yang bersifat umum maupun spesifik dengan total anggaran Rp.99.009.398.940,- dengan realisasi anggaran 89,2%.

Adapun program-program yang dilaksanakan di antaranya adalah : Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, serta Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan di bidang kesehatan mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dalam bentuk Tugas Pembantuan, berupa Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak, Pembinaan Upaya Kesehatan, Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.958.930.000,- dengan realisasi 86,17%.

Selain belanja langsung dan tugas pembantuan tersebut di atas, juga dialokasikan anggaran melalui belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk keperluan dukungan di bidang kesehatan antara lain untuk Bantuan kepada PMI Cabang Grobogan dan Hibah kepada kelompok masyarakat bidang Kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp.533.700.000,- dengan capaian 97,73%.

#### **D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI, MELALUI PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAN ANDALAN DI BERBAGAI BIDANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Urusan pemerintahan yang terkait dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat diselenggarakan dengan seoptimal mungkin. Urusan pemerintahan dimaksud sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 meliputi beberapa urusan diantaranya adalah urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan serta urusan Industri dengan total anggaran sebesar Rp.53.505.997.042,- dan terealisasi 93,02%.

## **E. PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan, ditempuh karena masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari data yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2008, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari angka 19,84%, 18,68%, 17,68%, 17,38% dan pada akhir tahun 2012 sebesar 16,13%. Hal yang menggembirakan ini tentunya harus senantiasa dipertahankan dan lebih ditingkatkan sehingga angka kemiskinan akan terus menurun.

Untuk melaksanakan prioritas ini ditempuh melalui Urusan Sosial, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketrasmigrasian serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran Rp.23.226.268.500,- dan terserap 96,75%.

Adapun program-program yang dilaksanakan di antaranya melalui Program Pengentasan Kemiskinan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Guna mendukung program-program dimaksud, juga telah dialokasikan anggaran dalam belanja tak langsung melalui Bantuan Dana Daerah untuk Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) dengan anggaran sebesar Rp. 1.737.500.000,- terealisasi 100%.

Selain itu, prioritas ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang dilaksanakan pada 17 desa/kelurahan di Kecamatan Purwodadi dengan anggaran sebesar Rp.3.042.500.000,- terealisasi 100%.

## **F. PRIORITAS PERLUASAN LAPANGAN KERJA UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN**

Penyerapan tenaga kerja sampai akhir tahun 2013 mencapai 710.014 orang dari jumlah angkatan kerja sebanyak 755.761 orang.



Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012, maka penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan, di mana angka prediksi pengangguran naik dari 4,33% menjadi 6,05%.

Dalam melaksanakan prioritas ini ditempuh melalui urusan ketenagakerjaan, yang diimplementasikan ke dalam program antara lain : Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.640.892.000,- terealisasi 97,77%.

Upaya perluasan tenaga kerja ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Tugas Pembantuan, berupa Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran Rp.1.049.581.000,- terealisasi sebesar 99,44%.

#### **G. PRIORITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan lebih mengedepankan prinsip transparansi, pertanggungjawaban publik (*public accountability*), dan partisipasi masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Secara konseptual, ketiga prinsip tata pemerintahan yang baik itu memiliki hubungan mutualistik dan saling mendukung.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik meliputi aspek-aspek antara lain meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan supremasi hukum dan HAM baik di masyarakat maupun di aparatur pemerintah, meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan demokratisasi serta kondusifitas wilayah, meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, serta senantiasa mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut ditempuh melalui beberapa urusan di antaranya adalah Urusan Perencanaan

Pembangunan, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang tertampung dalam program kegiatan baik program yang bersifat umum maupun spesifik dengan total anggaran Rp.114.030.182.600,- dan terealisasi 89,9%.

Di samping itu, untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam belanja tak langsung juga telah dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa serta bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan anggaran sebesar Rp. 37.091.484.000,- dan terealisasi sebesar 98,01%.

## **V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Pemerintah Pusat, melalui 5 (lima) Kementerian, yaitu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pertanian, dengan total anggaran sebesar Rp.101.778.378.000,- dan terserap sebesar 99,13%, dengan perincian :

- A. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan, dengan anggaran Rp. 16.958.930.000,- terealisasi 96,41%, untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan bagi 30 Puskesmas, Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar, dan Penyehatan Lingkungan.
- B. Urusan Bersama dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran Rp. 30.292.500.000,- terealisasi 100% digunakan untuk pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada 17 lokasi di Kecamatan Purwodadi, dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di 109 desa pada 18 kecamatan.
- C. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan anggaran Rp. 1.049.581.000,- terealisasi 99,44%, digunakan untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.
- D. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Kementerian Dalam Negeri, dengan anggaran Rp. 36.137.725.000,- terealisasi 99,99%,

digunakan untuk Program Bina Pembangunan Daerah dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- E. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian, dengan anggaran Rp. 17.339.642.000,- terealisasi 98,45%, digunakan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

## **VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

- A. Kerjasama Antar Daerah, berupa kerjasama antar regional di 6 (enam) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Grobogan, Demak, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga melalui Forum Kedungsepur, serta kerjasama bidang ketransmigrasian dengan Pemerintah Daerah lokasi penerima antara lain Pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- B. Kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO).
- C. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Instansi Vertikal, dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan dan keharmonisan untuk menciptakan terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Kegiatan ini ditempuh melalui Forum FKPD, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Forum Kerukunan Umat Beragama, Orientasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), pembinaan

dan pengawasan peraturan daerah, Koordinasi pendidikan politik, penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain-lain.

- D. Terkait dengan pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun ini menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten tetangga khususnya Kabupaten Pati dan Blora.
- E. Dalam Pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pemetaan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, rehabilitasi hutan dan lain-lain.
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan unsur masyarakat.
- G. Hal Lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil;
2. Kabupaten Penggerak Koperasi Tahun 2013 dengan Peringkat Paramadhana Madya Nugraha Koperasi;
3. Adhikarya Pangan Nusantara (Pembina Ketahanan Pangan);
4. Penghargaan Nasional Menuju Kabupaten Layak Anak Tahun 2013 Kategori Pratama;
5. Pemenang I Tingkat Nasional lomba Kelompok Tani Ternak Kambing An. Kelompok Mandiri;
6. Juara Nasional Lomba Website antar SKPD bidang Pertanian Kabupaten Kota seluruh Indonesia;
7. Juara III Nasional Indonesia Green Region Award dari SWA Magazine;
8. Peringkat III Tingkat Nasional lomba Petugas Inseminasi Buatan Tingkat Nasional an. Sdr. Sutrisno;

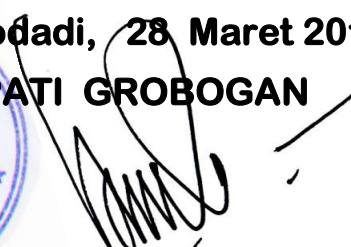
9. Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk SMPN 1 Tegowanu;
10. Sekolah Adiwiyata untuk SMPN 3 Gubug;
11. Serta beberapa prestasi tingkat regional lainnya.

## VII. PENUTUP

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, yang telah bersama-sama dengan segenap tenaga, pikiran, dan kerjasamanya dalam kegiatan pembangunan daerah, serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum selalu dalam keadaan baik dan kondusif.

Sepenuhnya saya sadari, bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena saya tidak mau atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Grobogan menjadi semakin maju, dengan masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera. Amin.

Purwodadi, 28 Maret 2014  
**BUPATI GROBOGAN**  
  
**H. BAMBANG PUDJIONO, SH**